



Pemprov Kalbar Dapat Insentif Fiskal Percepat Hapus Kemiskinan Ekstrem

PONTIANAK, SP - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) mendapatkan penghargaan kinerja berupa Insentif Fiskal Kategori Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2023.

Penghargaan tersebut diberikan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (Menkeu) Nomor 353 Tahun 2024 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada Tahun Anggaran (TA) 2024.

Adapun insentif fiskal tersebut diserahkan secara simbolis oleh Wakil Presiden (Wapres) Republik In-

donesia (RI) Ma'ruf Amin di Istana Wapres RI, Rabu (18/9).

Penjabat (Pj) Gubernur Kalbar Harisson mengatakan, prestasi yang diraih Pemprov kali ini sangat membanggakan. Kalbar berhasil menjadi salah satu dari sembilan provinsi yang mendapatkan penghargaan, karena tingkat kemiskinan ekstrim yang mengalami penurunan cukup cepat.

"Alhamdulillah Pemprov Kalbar mendapatkan insentif fiskal sebesar Rp5.735.370.000 dari pemerintah pusat sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan kami (Pemprov) dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim," kata Ha-

risson.

Seperti diketahui, berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan ekstrim Provinsi Kalbar tahun 2024 sebesar 0,57 persen. Sementara tahun 2023 sebesar 0,99 persen, turun dibanding tahun 2022 yang tercatat sebesar 1,41 persen.

Sehingga dengan demikian Provinsi Kalbar merupakan salah satu dari sembilan provinsi yang mendapatkan penghargaan dengan tingkat kemiskinan ekstrim yang mengalami penurunan cukup cepat.

Penghargaan ini diberikan atas empat kinerja penilaian. Yakni, kinerja

daerah, kepatuhan verifikasi data P3KE, pelaporan pelaksanaan kegiatan penurunan kemiskinan ekstrim, dan alokasi APBD, baik yang bersifat langsung maupun penunjang.

"Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pencapaian ini. Keberhasilan ini merupakan hasil dari berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemprov Kalbar dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim di Kalbar," ujarnya.

Harisson mengatakan, insentif fiskal tersebut akan kembali digunakan untuk mendukung pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalbar.

"Capaian ini juga menjadi motivasi bagi kami di jajaran Pemprov Kalbar untuk terus meningkatkan kinerja dalam mewujudkan Kalbar yang maju, dan sejahtera," tutupnya.

Sebagaimana dijelaskan Pj Gubernur Harisson, dana insentif fiskal yang diterima oleh Pemprov Kalbar akan dipergunakan sesuai dengan program kegiatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 43 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan.

Hal tersebut juga sebagai langkah konkret Pemprov dalam mendukung penu-

runan kemiskinan ekstrim di Kalbar.

Dimana dalam penyerahan penghargaan itu, juga disampaikan tiga arahan Wapres RI. Pertama Pemerintah Daerah (Pemda) diminta memaksimalkan dana insentif untuk kegiatan yang manfaatnya langsung diterima oleh masyarakat.

Kedua data P3KE digunakan untuk menargetkan penerima program kemiskinan ekstrim agar lebih tepat sasaran dalam intervensinya. Dan yang ketiga, mengintensifkan sinergi, dan kolaborasi antara kementerian/lembaga, dan Pemda, perguruan tinggi, dunia usaha, serta industri di sektor potensial.

Selain itu, pada kesem-

patan yang sama juga disampaikan arahan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI yang mengharapkan berbagai langkah konkret untuk mencapai target penghapusan kemiskinan ekstrim.

Diantaranya penajaman sasaran penerima manfaat melalui pengembangan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Serta melakukan konvergensi program, dan anggaran dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrim. Juga bagaimana semua pihak dapat menjaga tren penurunan kemiskinan ekstrim hingga target dapat tercapai. (din)